

PROTEKSI TARIF OPTIMAL UNTUK KEDELAI DI INDONESIA
PROTECTION FOR OPTIMUM TARIFF OF SOYBEAN IN INDONESIA

Reni Kustiari dan Saktyanu K. Dermoredjo¹
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor

ABSTRACT

Soybean is one of the major food commodities after rice and maize which have the advantage of protein-rich, therefore its usefulness as a food of vegetable protein source are various. National soybean consumption in 2011 amounted to 2.95 million tons, while domestic production had reached 851 thousand tons, there is a deficiency that must be imported around 2.1 million tons or about 71 percent of the total national consumption. Government support policies (seed, fertilizer and mechanization subsidy) have increased farmers' profit. However, protection policy such as import tariff of around 15.8 percent, 27.7 percent or 41.4 percent should be considered, in order farmer to achieve profits around 25 percent, 30 percent or 35 percent of total revenue, respectively. Import tariff above 27 percent could not be applied because bound rate of import soybean is 27 percent. Currently, the profit of soybean farming is around 16.5 percent of total revenue. The main purpose of this paper are as follows: (a) to analyze the profitability of soybean farming system; (b) to analyze the impact of government policies (import tariff) on the economy in general, and (d) to formulate policy recommendations for development of soybean industry and farmers' income.

Key-words: protection, tariff; profitability.

INTISARI

Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan jagung yang memiliki keunggulan yang kaya protein dan memiliki sumber protein nabati yang beragam. Konsumsi kedelai nasional tahun 2011 sebesar 2,95 juta ton, sementara produksi dalam negeri telah mencapai 851.000 ton, harus mengimpor sekitar 2,1 juta ton atau sekitar 71 persen dari total konsumsi nasional. Dukungan kebijakan pemerintah (benih, pupuk, dan mekanisasi subsidi) telah meningkatkan keuntungan petani. Namun, kebijakan perlindungan seperti tarif impor sekitar 15,8 persen, 27,7 persen atau 41,4 persen harus dipertimbangkan, agar petani mencapai keuntungan sekitar 25 persen, 30 persen atau 35 persen dari total pendapatan. Tarif impor di atas 27 persen tidak dapat diterapkan karena *bound rate* kedelai impor adalah 27 persen. Saat ini, keuntungan pertanian kedelai sekitar 16,5 persen dari total pendapatan. Tujuan utama dari makalah ini adalah: (a) untuk menganalisis keuntungan sistem usaha tani kedelai; (b) untuk menganalisis dampak kebijakan pemerintah (tarif impor) terhadap perekonomian secara umum, dan (d) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan industri kedelai dan pendapatan petani.

Kata kunci: proteksi, tarif; keuntungan.

¹ Alamat penulis untuk korespondensi: Reni Kustiari dan Saktyanu K. Dermoredjo. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jln. A. Yani 70 Bogor 0251-8333964; e-mail: renikustiari@yahoo.com; saktyanuadi@yahoo.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang. Komoditas kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan merupakan bahan makanan yang mempunyai kandungan gizi yang tinggi, meliputi protein (40 persen), lemak (19 persen), dan karbohidrat (24 persen). Namun, produksi kedelai domestik tidak mampu mencukupi kebutuhan kedelai nasional, sehingga sebagian besar (71 persen) kebutuhan domestik harus dipenuhi dari impor, walaupun negara Indonesia merupakan negara produsen keenam terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Cina, dan India. Produksi kedelai cenderung terus menurun dengan laju rata-rata sekitar -0,26 persen per tahun selama 2000 hingga 2011 (Anonim 2012).

Di sisi lain, kebutuhan kedelai terus meningkat pesat terlihat dari jumlah impor yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, jauh melampaui peningkatan produksi domestik, baik untuk memenuhi kebutuhan industri makanan maupun untuk pakan. Konsumsi kedelai cenderung terus meningkat dengan laju rata-rata sekitar 2,71 persen per tahun selama 2000 hingga 2011. Pada tahun 2011, volume impor kedelai mencapai sekitar dua juta ton atau senilai US\$ 1.25 milyar setara dengan Rp 11,3 Triliun, suatu nilai yang sangat besar (Anonim 2012). Produksi dalam negeri hanya sebesar 851 ribu ton, sementara kebutuhan total mencapai sekitar 2,9 juta ton. Kebutuhan kedelai terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan industri olahan pangan

seperti tahu, tempe, kecap, susu kedelai, tauco, dan snack (Darmadjadi *et al* 2005)

Penanganan permasalahan kedelai di Indonesia perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena beberapa alasan berikut. Pertama, hasil olahan kedelai merupakan menu penting bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk memenuhi kebutuhan protein; Kedua, jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat berdampak pada peningkatan kebutuhan hasil olahan kedelai; dan ketiga, biaya untuk mengimpor kedelai akan mengurangi devisa negara.

Untuk mengurangi ketergantungan impor kedelai yang terus meningkat dari waktu ke waktu dan untuk memacu peningkatan produksi kedelai dalam negeri, diperlukan berbagai kebijakan, baik kebijakan insentif maupun protektif, dalam rangka meningkatkan produksi kedelai dalam negeri, baik melalui perluasan areal, percepatan peningkatan produktivitas dan kebijakan pemerintah yang mendukung (pengaturan kembali tataniaga kedelai, tarif bea masuk, dan harga dasar kedelai)..

Guna merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi petani, maka dibutuhkan data dan informasi tentang karakteristik sistem usaha tani kedelai, struktur biaya usaha tani kedelai, dan berbagai kebijakan insentif yang dapat diterapkan pemerintah. Sehubungan dengan hal di atas, maka diperlukan analisis yang dapat memberikan gambaran kebijakan insentif dan proteksi terhadap komoditas kedelai dalam rangka mendorong produksi kedelai dan pendapatan petani.

METODE

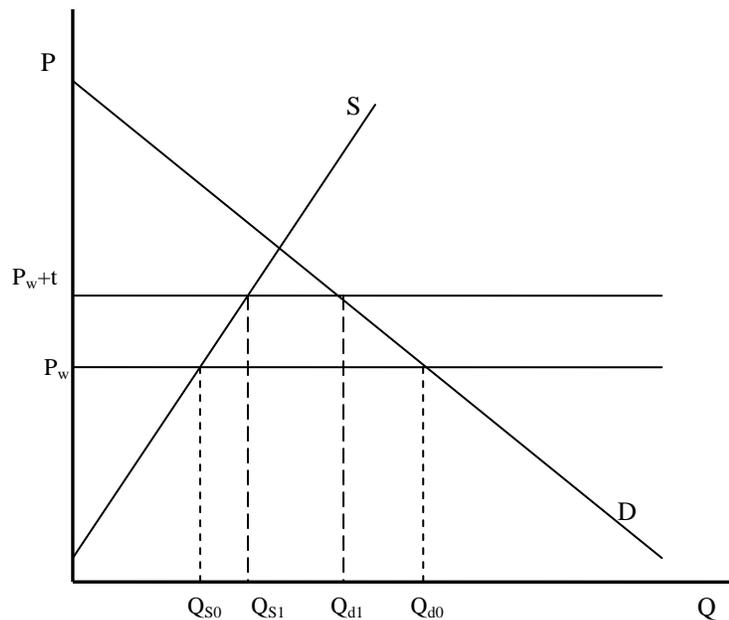
Kerangka Teoritis. Tarif adalah kebijakan perdagangan yang paling sederhana, yaitu pajak yang dikenakan pada barang yang

diimpor. Tujuan utama dari penerapan tarif adalah melindungi produsen domestik dari harga rendah sebagai akibat dari kompetisi impor. Penerapan tarif terhadap barang impor akan meningkatkan harga yang diterima produsen domestik. Efek dari tarif impor di negara kecil (*small country*) adalah pada kasus ketika suatu negara tidak dapat memengaruhi harga ekspor di pasar internasional, diilustrasikan pada Gambar 1.

Tarif menyebabkan harga barang yang diimpor di negara yang menerapkan tarif meningkat sebesar t , yaitu dari P_w menjadi P_w+t . Kenaikan harga akan meningkatkan produksi barang yang diimpor dari Q_{S0} ke Q_{S1} . Sementara itu kenaikan harga menyebabkan tingkat konsumsi akan turun dari Q_{D0} menjadi Q_{D1} . Oleh karena itu tarif mengakibatkan jumlah barang yang diimpor akan menurun di negara yang memberlakukan tarif. Dengan demikian

jumlah permintaan impor turun dari $Q_{S0}-Q_{D0}$ menjadi $Q_{S1}-Q_{D1}$.

Pengertian konsep tarif optimum dalam teori perdagangan internasional adalah tingkat tarif yang dapat memaksimalkan manfaat neto yang bersumber dari meningkatnya nilai tukar perdagangan di negara yang memberlakukan tarif, sehingga dapat mengimbangi dampak negatif yang diakibatkan oleh berkurangnya volume perdagangan yang diakibatkan pemberlakuan tarif. Namun demikian dalam studi ini hanya dihitung tarif optimum sebagai tarif bea masuk yang dikenakan dan diharapkan menjamin tingkat harga tertentu di pasar domestik (harga eceran dan harga jual petani) yang pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan petani sekitar 25 hingga 35 persen dari total penerimaan, serta tarif optimum untuk mencapai tingkat produksi tertentu.



Gambar 1. Dampak Tarif Impor Terhadap Permintaan dan Penawaran

Tingkat tarif optimum perlu dihitung dan diterapkan pada jangka waktu tertentu. Perhitungan tingkat tarif optimum perlu mengacu kepada tingkat harga di pasar dunia, nilai tukar rupiah terhadap US\$, tingkat harga di pasar domestik yang ingin dicapai, dan tingkat harga jual petani untuk menjamin keuntungan yang layak. Oleh karena itu kriteria tarif optimum adalah tingkat tarif yang menjamin berlakunya tingkat harga jual petani yang dapat memberikan keuntungan bersih (*return to management*) usaha tani pada kisaran yang dianggap layak dan tingkat tarif yang harus diterapkan untuk mencapai tingkat produksi tertentu.

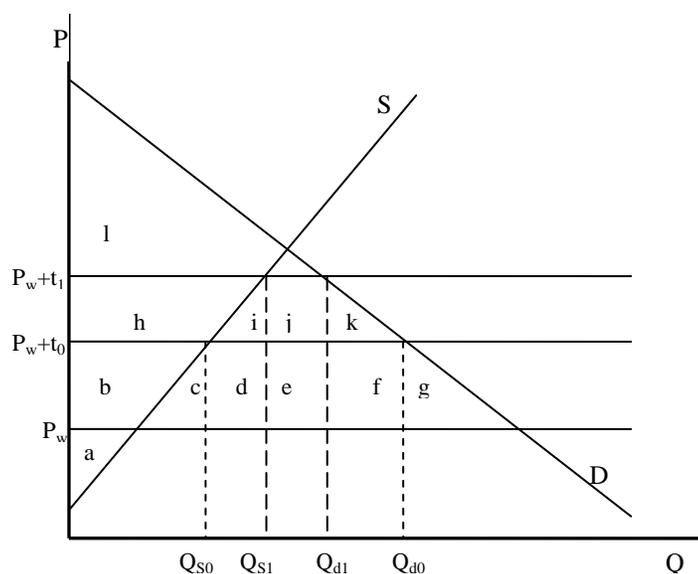
Data dan Sumber Data. Dampak tarif terhadap keseimbangan pasar domestik dilakukan dengan menggunakan peubah, antara lain harga produsen, perdagangan besar, konsumen, harga dunia, produksi, dan permintaan impor. Data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari publikasi dan dokumentasi berbagai instansi di dalam negeri dan di luar negeri, seperti FAO, Badan Pusat Statistik, BULOG, dan Departemen Pertanian. Penggunaan data struktur ongkos dan parameter elastisitas diperoleh dari penelitian terdahulu.

Metode Analisis. Analisis dilakukan pada tingkat usaha tani (*farm level*) dan tingkat makro. Analisis mikro dengan menggunakan data struktur ongkos kedelai yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Penerapan tarif impor akan meningkatkan harga eceran di pasar domestik. Melalui proses transmisi harga, peningkatan harga eceran di pasar domestik akan ditransmisikan ke harga jual di tingkat petani. Dengan kerangka analisis seperti ini dapat ditentukan tingkat harga jual tertentu di pasar domestik, sehingga

dapat memberikan tingkat keuntungan bersih untuk petani sekitar 25 persen hingga 35 persen.

Analisis tingkat makro menggunakan "*partial welfare analysis*" untuk memahami dampak penerapan tarif optimum terhadap harga komoditi di pasar domestik, produksi, permintaan, penawaran dan impor, serta dampaknya terhadap kesejahteraan produsen, konsumen, dan penerimaan pemerintah (Gambar 2). Berliant, M. & T. ten Raa (1994) telah menggunakannya dari campuran konsep positif dan normatif, kesetimbangan, dan optimalisasi.

Standar analisis parsial digunakan untuk menghitung efek kesejahteraan yang terkait dengan konsumen, produsen, dan pemerintah. Diasumsikan bahwa pemerintah perlu meningkatkan tarif dari t_0 ke t_1 . Peningkatan tarif akan mengakibatkan inefisiensi ekonomi (*deadweight loss*) yang lebih besar lagi, seperti yang ditunjukkan oleh area (d+f+i+k), dibandingkan dengan area (c+g) jika pemerintah memberlakukan tarif sebesar t_0 . Inefisiensi yang lebih besar ini karena konsumen harus membayar harga pada tingkat yang lebih tinggi dan oleh karena itu harus menanggung biaya ekonomi yang lebih besar, yaitu area (h+i+j+k). Sebaliknya, produsen mengalami peningkatan kesejahteraan sebesar area (h) dan pemerintah area (j-d-f) sebagai akibat peningkatan tarif dari t_0 ke t_1 . Turunnya penerimaan dari tarif disebabkan oleh penurunan jumlah barang yang diimpor sebagai dampak dari kenaikan produksi dalam negeri yang merupakan akibat dari peningkatan harga di tingkat petani. Efek dari peningkatan tarif impor disajikan pada Tabel 1.



Gambar 2. Ilustrasi Dampak Peningkatan Tarif Impor

Tabel 1. Efek Peningkatan Tarif Terhadap Tingkat Kesejahteraan

Item	Tarif t_0	Tarif t_1	Perubahan
Konsumen	$h+i+j+k+l$	l	$-(h+i+j+k)$
Produsen	$a+b$	$a+b+h$	h
Pemerintah	$d+e+f$	$e+j$	$j-d-f$
Kesejahteraan Netto			$-(d+f+i+k)$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Finansial Usaha Tani Kedelai.

Sejak 1998, monopoli impor kedelai oleh Bulog dicabut. Bea masuk untuk kedelai ditetapkan paling tinggi lima persen, padahal besaran tarif yang dapat diberlakukan mencapai 27 persen. Sementara di negara maju, komoditas pertanian terutama produk pangan, dikenai tarif bea masuk yang tinggi. Dengan perlindungan yang rendah ini, mudah sekali kedelai impor dengan harga murah mengancam produsen kedelai dalam negeri. Seperti diketahui, harga kedelai

impor tidak mencerminkan harga produksi aktual di negara asalnya. Karena di dalamnya terkandung unsur subsidi dan harga *dumping*. Terutama kedelai yang berasal dari negara maju. Pemerintah telah melakukan dua tahap harmonisasi tarif, termasuk kedelai. Saat ini tarif impor MFN kedelai adalah nol persen, keadaan ini sulit untuk mendorong produksi kedelai nasional dan mengerem laju impor.

Menurut data struktur ongkos usaha tani kedelai tahun 2012, dengan tarif bea masuk impor kedelai nol persen, petani kedelai domestik hanya memperoleh

keuntungan usaha tani sekitar 16,51 persen, nilai B/C dan R/C rasio masing-masing sekitar 0,20 dan 1,20 (Lampiran Tabel 1). Untuk menentukan tingkat tarif impor kedelai yang optimal agar petani mendapatkan keuntungan yang memadai dan layak, simulasi dilakukan dengan tingkat keuntungan petani sebesar 25 persen; 30 persen; dan 35 persen.

Berdasarkan tingkat produktivitas sekitar 1,5 ton per hektar dan biaya per kg sebesar Rp 5010, maka untuk mendapatkan keuntungan usaha tani sebesar 25 persen, 30 persen, dan 35 persen, petani kedelai nasional harus mendapat harga jual, masing-masing sebesar Rp. 6.679; Rp 7156, dan Rp 7707 per kg. Kondisi ini sangat sulit, karena harga kedelai domestik menjadi tidak dapat bersaing dengan kedelai impor. Solusi untuk memberi insentif produksi kedelai domestik kepada petani antara lain adalah jaminan harga jual kedelai dengan tingkat keuntungan pasti. Berdasarkan asumsi harga pokok produksi Rp 6.000 per kg dan tarif

bea masuk kedelai saat ini nol persen, maka untuk memperoleh keuntungan usaha tani 25 persen maka harga di tingkat petani harus sekitar Rp 6.679 per kg dan tarif bea masuk yang diterapkan (MFN) harus dinaikkan menjadi 15,80 persen (ad valorem) atau Rp 808,56 per kg (specific tariff). Pada tingkat keuntungan 25 persen dari total penerimaan, nilai B/C dan R/C rasio masing-masing sekitar 0,33 dan 1,33 Tingkat tarif maksimum yang dapat diterapkan pada kedelai impor adalah 27 persen, maka masih ada peluang pemerintah untuk memberi insentif usaha bagi petani kedelai domestik. Hal penting yang harus dipertimbangkan adalah beban konsumen kedelai di sektor hilir, misalnya sektor peternakan dan industri pakan ternak. Hal ini mengingat sebagian besar konsumen kedelai impor di dalam negeri adalah kedua segmen tersebut. Sementara untuk konsumsi rumah tangga (pangan) lebih banyak menggunakan kedelai produksi lokal.

Tabel 5. Perkembangan Harga Kedelai di Tingkat Petani, Pedagang Besar, Konsumen dan Harga Internasional, 2000–2011

Tahun	Harga Dalam Negeri (Rp/Kg)			Harga Internasional (USD/MT)**	Harga Internasional (Rp/Kg)**
	Petani*	Pedagang Besar*	Konsumen*		
2000	2.033,00	2.259,00	2.616,00	182,96	1.561,38
2001	2.381,00	2.469,00	3.091,00	168,81	1.670,63
2002	2.604,00	3.002,00	3.113,00	189,14	1.822,32
2003	2.597,00	2.948,00	3.296,00	233,41	2.034,52
2004	3.295,00	3.699,00	4.922,00	276,56	2.470,24
2005	3.391,00	4.540,00	4.634,00	223,56	2.197,58
2006	3.381,00	4.364,00	4.488,00	217,38	2.045,01
2007	4.533,00	4.821,00	4.924,00	316,63	2.908,12
2008	6.698,00	7.117,00	8.131,00	452,97	4.602,21
2009	6.292,00	6.847,00	8.929,00	378,82	3.854,51
2010	6.332,00	6.650,00	7.487,00	385,55	3.531,83
2011	5.746,00	6.733,00	7.201,00	484,09	4.249,83
Pertumbuhan/ Tahun (%)	11,17	11,46	11,80	11,27	11,58

Sumber : * Direktorat Pasdom, Ditjen PPHP

**CBOT (Chicago Board of Trade), Bloomberg.

Artinya, tarif impor MFN kedelai yang baru harus disosialisasikan kepada semua stakeholder untuk mencapai nilai optimal yang disepakati. Kajian teknis dan matematis saja kurang bijaksana tanpa mempertimbangkan dampak negatif bagi semua pihak yang berkepentingan didalamnya. Kelangkaan kedelai akan mengakibatkan masyarakat dengan daya beli relatif rendah mengalami kekurangan gizi. Untuk menghindari hal tersebut salah satu kegiatan atau usaha yang perlu dilakukan adalah menyediakan kedelai dengan harga yang terjangkau, dengan meningkatkan produksi atau melakukan impor.

Analisis Parsial Ekuilibrium. Dengan menggunakan metode keseimbangan parsial dilakukan estimasi dampak kebijakan tarif impor produk kedelai terhadap kesejahteraan masyarakat. Data sekunder yang digunakan meliputi tarif impor, harga produsen atau konsumen kedelai, harga impor kedelai dikompilasi dari berbagai publikasi terdahulu. Asumsi dan data yang digunakan disajikan pada Tabel 6. Hasil simulasi agar dicapai keuntungan peternak sebesar 25 persen, 30 persen, dan 35 persen dapat

dilihat pada Lampiran Tabel 2. Analisis makro untuk memahami dampak perubahan tarif terhadap keseimbangan pasar domestik dilakukan dengan menggunakan asumsi seperti pada Tabel 6.

Berdasarkan pembahasan tarif impor optimal untuk pencapaian keuntungan usaha tani 25 persen hingga 35 persen, tarif impor kedelai harus diubah dari nol persen menjadi 15,80 persen hingga 41,4 persen. Kenaikan bea masuk kedelai yang mencapai Rp 808 hingga Rp 2120 per kg tersebut tentunya akan berdampak pada keseimbangan pasar. Sehubungan dengan kedelai sebagai komoditas impor, maka pasar yang terpengaruh pertama kali adalah perdagangan besar kemudian diikuti dengan pengaruh terhadap harga eceran (konsumen).

Selain diperkirakan mampu menjamin keuntungan usaha tani sebesar 25 persen hingga 35 persen, dari sisi keseimbangan pasar, peningkatan tarif impor kedelai akan berdampak pada tingkat kesejahteraan produsen, konsumen, permintaan, penawaran, impor, dan kesejahteraan sosial secara umum (Lampiran Tabel 2).

Tabel 6. Data yang Digunakan Untuk Simulasi Peningkatan Tarif Kedelai

Uraian	Keterangan	Nilai
Harga dunia (US\$/ton)	Data	544.50
Nilai tukar (Rp/US\$)	Data	9400.0
Harga Border (US\$/ton)	Data	544.50
Harga paritas impor Border (Rp/kg)	Data	5118.30
Harga paritas impor pada t0 (Rp/kg)	Data	5773.44
Harga konsumen aktual (Rp/kg)	Data	7717.00
Harga produsen pada t0 (Rp/kg)	Data	6046.00
Produksi Kedelai (000 ton)	Data	851.30
Impor Kedelai (000ton)	Data	2100.00
Permintaan Kedelai (000ton)	Data	2951.30
Elastisitas permintaan	Regresi	-0.66
Elastisitas penawaran	Regresi	0.14
Elastisitas Transmisi harga konsumen ke produsen	Regresi	0.99

Seperti lazimnya pengaruh perubahan harga, maka akan menciptakan keseimbangan baru pada pasar komoditas terkait. Harga perdagangan besar atau wholesale akan naik sebesar 10,48 persen (Rp 808,56) dari semula Rp 7.717,00 menjadi Rp 8.525,56 per kg. Hal yang sama juga terjadi untuk harga produsen, di sini harga produsen juga mengalami peningkatan sebesar 10,48 persen (Rp 633,48) dari semula Rp 6.046,00 menjadi Rp 6.679,48. Akibat tarif impor naik, maka harga domestik akan naik, sehingga permintaan terhadap kedelai secara umum akan turun. Permintaan kedelai turun sebesar 6,87 persen (202,73 ribu ton) dari 2,951 juta ton menjadi 2,749 juta ton. Karena terdorong kenaikan harga, maka penawaran meningkat. Kemungkinan besar diperoleh dari produksi domestik karena insentif keuntungan produksi. Namun, peningkatan penawaran hanya sebesar 1,47 persen (12,49 ribu ton). Penawaran domestik meningkat menjadi 851,3 ribu ton dari 863,79 ribu ton.

Karena harga kedelai impor naik, penawaran domestik meningkat, maka volume kedelai impor akan tergeser oleh penawaran domestik. Volume kedelai impor turun 215,22 ribu ton menjadi hanya 1.884,78 ribu ton. Karena peningkatan harga, maka konsumen akan merugi, sehingga surplus konsumen berkurang. Penurunan surplus konsumen sebesar Rp 2.304,35 milyar.

Sementara itu, dengan kenaikan harga produsen, terutama petani kedelai nasional, peningkatan surplus produsen kedelai domestik sebesar Rp 543,24 milyar. Sehubungan dengan penetapan bea masuk yang lebih tinggi, maka pemerintah akan mengalami peningkatan penerimaan pendapatan dari tarif. Peningkatan tarif impor kedelai menjadi 15,80 persen akan

memberi tambahan peningkatan penerimaan pemerintah sebesar Rp 1.523,96 milyar. Secara agregat ekonomi kedelai nasional akan menurun dengan penurunan kesejahteraan sosial (surplus bersih) sebesar Rp 237,15 milyar.

Saat ini harga kedelai impor jauh lebih rendah dari harga pokok produksi kedelai domestik, yaitu Rp 5.009 per kg. Sawit & Rusastra (2005) memprediksi bahwa impor kedelai Indonesia akan semakin besar pada tahun mendatang karena kemudahan tataniaga impor berupa dihapusnya monopoli Bulog sebagai importir tunggal serta dibebaskannya bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN kedelai). Selain itu, negara eksportir kedelai terbesar dunia, seperti AS juga menyediakan kredit ekspor dengan bunga subsidi, sehingga mendorong importir kedelai Indonesia untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Peningkatan impor kedelai setiap tahunnya tidak lepas dari pengaruh dari faktor di atas, sehingga volume impor kedelai merupakan impor terbanyak dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya. Selain untuk konsumsi pangan, kedelai maupun bungkilnya banyak dimanfaatkan oleh industri pakan ternak domestik. Oleh karena itu, ketergantungan impor kedelai akan menimbulkan kerentanan sektor peternakan domestik.

Kesejahteraan sosial merupakan cerminan dari pencapaian pembangunan ekonomi dalam bidang ketahanan pangan, pembangunan perdesaan, dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Insentif produksi usaha tani dengan sendirinya akan menciptakan perbaikan ekonomi rumah tangga petani tersebut. Secara agregat kekuatan ekonomi perdesaan setempat akan menyusun kekuatan guna mendorong pembangunan. Inti dari keberhasilan

pembangunan perdesaan setempat adalah terjaminnya ketahanan pangan baik di tingkat rumah tangga, perdesaan, sampai tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa kebijakan makro agregat, dalam hal ini tarif bea masuk impor, berpengaruh besar pada kesejahteraan mikro.

Berdasarkan buku Schedule XXI-WTO, *bound tariff* impor kedelai Indonesia adalah 27 persen, namun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI no 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klarifikasi Barang dan Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor tanggal 14 Desember 2011, maka tarif impor untuk benih kedelai nol persen dan lain-lainnya lima persen. Adakalanya pemerintah menurunkan tarif menjadi nol persen apabila kondisi produksi kedelai dalam negeri menurun dan ketersediaan kedelai dalam negeri menjadi langka.

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan.

Secara umum kegiatan usaha tani kedelai pada tahun 2012, berdasar analisis finansial usaha tani kedelai, menunjukkan kelayakan ekonomi dengan nilai R/C lebih dari satu. Pada tingkat tarif impor saat ini sebesar nol persen, keuntungan usaha tani kedelai hanya 16,5 persen.

Tarif impor untuk kedelai sekitar 15 hingga 27 persen akan meningkatkan keuntungan usaha tani kedelai menjadi 25 persen hingga 35 persen. Tarif impor kedelai di bawah bound tarif yang terdaftar dalam Schedule Indonesia di WTO masih mungkin untuk diterapkan sebagai tarif MFN baru. Namun kebijakan tarif impor optimal untuk kedelai harus diterapkan dengan pertimbangan yang baik karena masyarakat Indonesia akan kehilangan surplus kesejahteraan sosial sebesar Rp 398,2 milyar.

Solusi untuk memberi insentif produksi kedelai domestik kepada petani

antara lain adalah jaminan harga jual kedelai dengan tingkat keuntungan pasti dan proteksi harga dengan menerapkan tarif impor. Berdasarkan asumsi harga pokok produksi Rp 6.000 per kg dan tarif bea masuk kedelai saat ini nol persen, maka untuk memperoleh keuntungan usaha tani 25 persen dan 30 persen, maka harga di tingkat petani harus sekitar Rp 6.679 dan Rp 7.156 per kg. Untuk itu, tarif bea masuk yang diterapkan (MFN) harus dinaikkan, masing-masing menjadi 15,8 persen dan 27 persen (ad valorem) atau Rp 808,56 dan Rp 1.417,5 per kg (specific tariff). Pada tingkat keuntungan 25 persen dan 30 persen dari total penerimaan, nilai B/C rasio masing-masing sekitar 0,33 dan 0,43, sedangkan nilai R/C rasio masing-masing sekitar 1,33 dan 1,43. Tingkat tarif maksimum yang dapat diterapkan pada kedelai impor adalah 27 persen, maka masih ada peluang pemerintah untuk memberi insentif usaha bagi petani kedelai domestik.

Kebijaksanaan insentif bea masuk impor yang bertujuan untuk melindungi kedelai domestik dipandang sangat relevan untuk mendorong petani agar tetap melakukan usaha tani kedelai. Namun kebijakan insentif ini hanya akan pengaruh positif bilamana ada potensi peningkatan produktivitas dan sistem pemasaran yang efisien. Indonesia sepantasnya tetap memelihara dan mengembangkan produksi pertanian disertai dukungan kebijaksanaan insentif yang memadai bagi petani, melalui peningkatan tarif bea masuk produk.

Pemerintah seyogyanya memperhatikan atau menjamin ketersediaan benih varietas unggul baru di tingkat petani dan didistribusikan secara efisien. Selain itu, penyuluhan yang intensif dapat dilakukan agar petani dapat meningkatkan penggunaan terobosan teknologi yang tepat guna.

DAFTAR PUSTAKA

Berliant, M. & T. ten Raa. 1994. Regional science: The state of the art. *Regional Science and Urban Economics*. 23: 631-647

Anonim. 2012. *Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Darmadjati, D.S., Marwoto, D.K.S. Swastika, D.M. Arsyad & Y. Hilman. 2005. *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kedelai*. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.

Pusdatin 2012. *Statistik Pertanian*. Pusat Data dan Statistik Pertanian. Kementerian Pertanian. Jakarta.

Rusastra. I W. 1996. Keunggulan Komparatif, Struktur Proteksi, dan Perdagangan Internasional Kedelai Indonesia. dalam Amang dkk (Eds). *Ekonomi Kedelai di Indonesia*. IPB Press. Bogor.

Sawit, M.H. dan I W. Rusastra. 2005. *Globalisasi dan Ketahanan Pangan*. Laporan akhir dari bagian laporan penelitian Road Map Memperkuat Kembali Ketahanan Pangan. LPEM UI. Jakarta

Lampiran Tabel 2. Analisis Perhitungan Tarif Optimum dan Pengaruhnya terhadap Permintaan dan Penawaran Produk Kedelai

Uraian	Tarif Saat Ini	Keuntungan		
		25%	30%	35%
Kebijakan Tarif Impor (Rp/Kg)	0	808.56	1417.53	2120.19
Kebijakan Tarif Impor (%)	0	15.8	27.7	41.42
Perubahan tarif (Rp/kg)	dT	808.56	1417.53	2120.19
Perubahan harga wholesale (Rp/kg)	dPw	808.56	1417.53	2120.19
harga wholesale pada t1 (Rp/kg)	Pw1	8525.56	9134.53	9837.19
% perubahan harga wholesale (%)	%dPw	10.48	18.37	27.47
%Perubahan harga produsen (%)	%dPP	10.48	18.37	27.47
Perubahan harga produsen (Rp/kg)	dPP	633.48	1110.58	1661.09
Harga produsen pada t1(Rp/kg)	PP1	6679.48	7156.58	7707.09
Efek terhadap permintaan (%)	%dQd	-6.87	-12.04	-18.01
Perubahan jumlah permintaan (000ton)	dQd	-202.73	-355.42	-531.59
Permintaan pada t1(000ton)	Qd1	2748.57	2595.88	2419.71
Efek terhadap penawaran (%)	%dQs	1.47	2.57	3.85
Perubahan jumlah penawaran (000ton)	dQs	12.49	21.89	32.74
Penawaran pada t1(000ton)	QS1	863.79	873.19	884.04
Jumlah impor pada t1(000ton)	Qm1	1884.78	1722.69	1535.66
Efek terhadap jumlah impor (000ton)	dQm	-215.22	-377.31	-564.34
Efek terhadap surplus konsumen (juta Rp)	dCS	-2E+06	-4E+06	-6E+06
Efek terhadap surplus produsen (juta Rp)	dPS	543236	957597	1441283
Efek terhadap penerimaan pemerintah(juta Rp)	dGR	1523962	2441967	3255894
Efek terhadap surplus bersih (juta Rp)	dNS	-237148	-532084	-996591